

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA DAERAH
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

Tony Gustian Pratama



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRACT

THE EFFECT OF LOCALLY GENERATED REVENUE AND CAPITAL EXPENDITURE ON FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT PROVINCE IN INDONESIA

By

Tony Gustian Pratama

This study was conducted with the aim of examining the effect of local revenue and capital expenditures on the financial performance of local governments. The data source in this study uses secondary data with a sample of local government financial statements for 2017-2019. The research method used in this study is multiple linear analysis with SPSS 26 software application. The results show that local revenue has a significant positive effect on local government financial performance, and capital expenditure has a significant positive effect on local government financial performance.

Keywords : Locally Generated Revenue, Capital Expenditure, Performance of Local Government

ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

By

Tony Gustian Pratama

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017-2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis linier berganda dengan aplikasi software SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA DAERAH
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DI INDONESIA**

**Oleh
Tony Gustian Pratama**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Tony Gustian Pratama**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1741031019**

Program Studi : **Akuntansi**

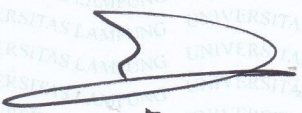
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**




Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.
NIP 197506202000122001


Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt.
NIP 195809191995011001

2. Ketua Jurusan Akuntansi


Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP 197008171997032002

MENGESAHKAN

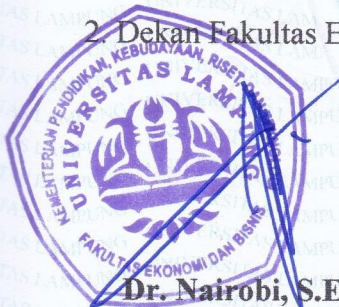
1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.

Sekretaris : Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nurdiono, S.E., M.M., Ak., CA., CPA.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 November 2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tony Gustian Pratama

NPM : 1741031019

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia” di tulis secara sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini saya tidak melakukan plagiarisme atau melakukan pengutipan karya tulis orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Desember 2021



Tony Gustian Pratama

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Tony Gustian Pratama yang dilahirkan di Kab. Cirebon pada tanggal 15 April 1998. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Deby Utomo dan Ibu Leli Kurniawati.

Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Al-Husna dan lulus pada tahun 2004. Lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Way Mengaku dan lulus pada tahun 2010. Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh oleh penulis di SMP Negeri 1 Liwa dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Liwa dan lulus pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2017.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah:5)

“Sukses adalah jumlah dari upaya kecil, yang diulangi hari demi hari”

(Robert Collier)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

**Kupersembahkan karya yang sangat berarti ini kepada
Kedua Orang Tua tercinta dan tersayang, Bapak Deby Utomo dan Ibu Leli
Kurniawati**

Yang telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih yang tiada henti dan senantiasa selalu memberikan doa, dukungan, bimbingan serta motivasi.

Terima kasih ayah dan ibu atas segala hal yang telah diberikan.

Adikku tersayang Delia Juwita Putri

Yang selalu memberikan canda, tawa, dan semangat ketika dilanda kelelahan.

Terima kasih adikku atas canda dan tawa yang telah diberikan.

Seluruh keluarga besarku, sahabat, dan teman-teman yang kusayangi

Terima kasih atas segala doa, dukungan, motivasi dan semangat yang telah diberikan selama ini

**Almamaterku tercinta Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Lampung.**

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia" . Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, do'a dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, kritik, saran, dan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya mengucapkan terima kasih

banyak ibu atas ilmunya yang sangat bermanfaat.

5. Bapak Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing Pendamping telah memberikan waktu, kritik, saran, dan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak bapak atas ilmunya yang sangat bermanfaat.
6. Bapak Prof. Dr. Nurdiono, S.E., M.M., Ak., CA., CPA. selaku Dosen Penguji Utama. Terima kasih atas kesediaannya memberikan waktu, bimbingan, arahan, saran, nasihat, dan masukan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian skripsi dan selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama menjadi mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, serta pembelajaran selama proses perkuliahan berlangsung.
9. Seluruh staf akademik, administrasi, tata usaha, para pegawai serta staf keamanan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
10. Ayah dan Ibu tercinta Bapak Deby Utomo dan Ibu Leli Kurniawati. Terimakasih telah memberikan semangat, dukungan, doa, motivasi dan perhatian yang diberikan sepenuh hati dan tiada henti. Menjadi penyemangat terbaikku disaat rasa lelah melanda.
11. Adikku tersayang Delia Juwita Putri yang telah memberikan canda, tawa serta semangat ditengah rasa lelah melanda. Terimakasih atas segala hal.

12. Sahabatku Bicar Sianturi, Kirangga Mahibbat, dan Prisilia Febriyanti. Terima kasih semua atas waktu dan canda tawa yang kalian berikan.
13. Teman-teman *Limbad Everywhere* : Bicar, Beni, Rendi, Nopri, Uyung, Anjay, Agung, Ipan, Depri, dan Tompul. Terima kasih atas dukungan yang diberikan.
14. Teman-teman Keluarga Baik-Baik : Fazares, Wafi, Prisilia, Rinanda, Santi, Rani, dan Nabila. Terima kasih untuk semua waktu dan momen yang dilalui.
15. Seluruh teman-teman Akuntansi Pararel 2017 terima kasih telah membantu belajar, berbagi canda tawa, dan sukses untuk kalian semua.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Bandar Lampung, 16 Desember 2021
Penulis,

Tony Gustian Pratama

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Anggaran.....	8
2.1.2 Pendapatan Daerah.....	9
2.1.3 Belanja Daerah.....	12
2.1.4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	13
2.1.5 Kinerja Keuangan	14
2.1.5.1 Pengertian Kinerja Keuangan.....	14
2.1.5.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan	15
2.1.5.3 Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan	16
2.2 Penelitian Terdahulu	17
2.3 Kerangka Teori	23
2.4 Hipotesis Penelitian	24
2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	24
2.4.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	26
III. METODELOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Dan Sumber Data	28

3.2	Populasi Dan Sampel	28
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	28
3.4	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	29
3.5	Teknik Analisis Data.....	31
3.5.1	Statistik Deskriptif	31
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	31
3.5.3	Analisis Regresi Linier Berganda	33
3.5.4	Uji Statistik F	34
3.5.5	Uji Statistik T.....	34
3.5.6	Koefisien Determinasi (R ²)	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .		
4.1	Hasil Penelitian.....	35
4.1.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	35
4.1.2	Uji Asumsi Klasik	37
4.1.2.1	Uji Normalitas	37
4.1.2.2	Uji Multikolonieritas	37
4.1.2.3	Uji Autokorelasi.....	38
4.1.2.4	Uji Heterokedastisitas	39
4.1.3	Uji Hipotesis.....	39
4.1.3.1	Analisis Regresi Linier Berganda.....	39
4.1.3.2	Uji Statistik F.....	40
4.1.3.3	Uji Statistik T.....	41
4.1.3.4	Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	43
4.2	Pembahasan Penelitian	43
4.2.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	43
4.2.2	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	46
V. KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan.....	45
5.2	Keterbatasan Penelitian	46
5.3	Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif	35
Tabel 4.2 Uji Normalitas.....	37
Tabel 4.3 Uji Multikolonieritas.....	38
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi.....	38
Tabel 4.5 Uji Heterokedastisitas	39
Tabel 4.6 Analisis Regresi Linier Berganda	39
Tabel 4.7 Uji Statistik F.....	41
Tabel 4.8 Uji T X_{1A} , X_{1B} , dan X_{1C}	42
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	43

DATA LAMPIRAN

Lampiran 1	Uji Multikolonieritas
Lampiran 2	Uji Autokorelasi
Lampiran 3	Uji Heterokedastisitas
Lampiran 4	Uji Statistik F
Lampiran 5	Uji Statistik T
Lampiran 6	Uji Koefisien Determinasi (R^2)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki lembaga pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Lembaga pemerintahan pada setiap daerah memiliki peran dalam meningkatkan pelayanan guna memfasilitasi kepentingan masyarakat yang secara tidak langsung memiliki dampak terhadap kesejahteraan yang dicapai dengan cara mengelola keuangan pemerintah dengan baik. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan penerapan kebijakan otonomi pada suatu daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri (Sujarweni, 2015). Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi. Untuk melihat seberapa baik dan benarnya pengelolaan keuangan suatu daerah, maka pengukuran kinerja keuangan perlu untuk dilakukan.

Menurut Jumingan (2006) pengukuran kinerja keuangan memiliki dua tujuan. Pertama pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan. Kedua untuk mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Akuntabilitas bukan hanya untuk menunjukkan uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan pemerintah daerah menggunakan uang publik tersebut dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2004).

Menurut Halim (2008) alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah dengan menggunakan rasio keuangan terhadap APBD meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan. Kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan. Menurut Halim (2008) rasio pertumbuhan dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan pendapatannya dari satu periode ke periode berikutnya.

Berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2019 di seluruh daerah realisasi anggaran baru mencapai 60%. Menteri Dalam Negeri mengatakan anggaran sebesar 60% tersebut hanya dialokasikan untuk belanja pegawai serta barang dan jasa, maka yang menikmati hanya para pegawai saja sedangkan masyarakat tidak merasakannya. Sehingga anggaran untuk belanja modal harus benar-benar diperhatikan oleh kepala daerah (Nasional Kompas, 2019).

Berikut merupakan daftar ringkasan total pendapatan dan belanja daerah Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2019

Tabel 1.1 Daftar Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2019

Provinsi	Pendapatan			Belanja		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Aceh	15.692.775.230.941	15.752.800.901.652	100,38	13.989.444.130.672	12.449.621.461.070	88,99
Sumatera Utara	14.034.339.344.970	13.079.598.635.469	93,20	11.381.194.207.215	10.170.845.213.205	89,37
Sumatera Barat	6.607.003.065.730	6.390.337.204.584	96,72	6.050.552.689.161	5.640.332.373.436	93,22
Riau	9.426.063.395.934	8.703.232.610.159	92,33	7.630.879.782.830	6.853.113.756.072	89,80
Kepulauan Riau	3.713.986.345.124	3.939.451.004.378	106,07	3.332.827.358.657	3.153.016.717.443	94,60
Jambi	4.566.472.026.795	4.575.192.849.736	100,19	4.338.583.747.877	3.946.292.724.212	90,96
Bengkulu	3.303.844.486.446	2.934.057.941.393	88,81	3.516.542.700.667	3.118.303.518.797	88,68
Sumatera Selatan	8.849.942.842.746	9.280.741.071.448	94,22	7.074.829.339.229	6.422.760.771.550	90,78
Bangka Belitung	2.762.433.155.880	2.694.205.659.655	97,53	2.523.039.763.264	2.264.022.634.746	89,73
Lampung	7.371.432.528.025	7.266.993.438.827	98,58	6.011.395.437.367	5.583.637.872.353	92,88
Banten	11.699.894.624.576	11.201.873.129.053	95,74	9.596.445.290.064	8.350.271.881.359	87,01
Jawa Barat	36.127.118.512.463	36.037.894.762.460	99,75	24.721.129.219.645	22.437.800.843.469	91

DKI Jakarta	74.997.497.375.481	62.300.679.833.068	83,07	77.010.363.876861	64.099.287.469.013	83,23
Jawa Tengah	26.340.639.488.000	25.859.780.137.936	98,17	19.665.066.328.000	18.456.935.979.539	93,86
D.I. Yogyakarta	5.713.924.265.502	5.699.357.232.440	99,75	4.949.650.384.323	4.523.971.346.582	91,40
Jawa Timur	33.427.673.068.552	33.455.209.327.986	100,08	28.755.505.302.004	25.939.668.270.716	90,21
Bali	6.498.850.974.403	6.645.538.871.169	102,26	5.005.329.707.432	4.403.625.560.597	87,98
Nusa Tenggara Barat	5.403.971.042.675	5.197.727.488.242	96,18	4.710.254.015.957	4.375.546.682.896	92,89
Nusa Tenggara Timur	5.561.056.352.548	5.354.092.405.679	96,28	5.222.406.123.824	4.758.379.563.095	91,11
Kalimantan Barat	5.899.219.616.674	5.939.753.156.803	100,69	5.120.400.502.551	4.685.285.323.793	91,5
Kalimantan Selatan	7.097.098.839.015	6.756.797.304.944	95,21	5.973.305.673.348	5.532.643.675.833	92,62
Kalimantan Tengah	4.959.931.295.330	4.990.195.455.014	100,61	4.731.027.889.509	4.312.954.965.435	91,16
Kalimantan Utara	2.636.616.427.854	2.610.072.420.323	98,99	2.455.267.799.750	2.131.825.490.532	86,83
Kalimantan Timur	11.137.939.446.362	11.775.086.446.200	105,72	7.790.411.761.586	6.488.228.331.289	83,28
Gorontalo	1.959.010.475.452	1.941.076.769.545	99,08	1.853.466.380.345	1.779.814.813.995	96,03
Sulawesi Utara	4.113.900.047.999	3.940.225.396.820	95,78	4.277.911.929.750	3.674.801.265.284	85,90
Sulawesi Selatan	9.922.960.496.105	9.573.910.861.960	96,48	7.673.820.465.651	7.246.039.362.054	94,43
Sulawesi Tengah	4.170.517.779.691	4.128.153.120.869	98,98	4.549.853.924.998	4.098.771.219.451	90,09
Sulawesi Tenggara	4.131.606.314.578	4.166.543.383.146	100,85	4.096.534.381.783	3.743.684.367.363	91,39
Sulawesi Barat	2.043.393.479.200	2.034.819.568.402	99,58	1.889.369.193.841	1.784.433.295.571	94,45
Maluku	3.192.391.113.165	3.108.914.880.043	97,39	2.965.991.169.731	2.759.044.049.233	93,02
Maluku Utara	2.745.806.148.000	2.688.174.140.826	97,90	2.682.649.635.014	2.474.855.784.345	92,25
Papua Barat	9.209.218.376.001	11.339.763.889.678	123,13	6.293.113.148.372,00	5.409.692.414.864	85,96
Papua	15.145.296.542.550	15.239.936.933.219	100,62	12.189.599.588.300	10.302.640.234.202	84,52

Tabel 1.1 yang berisi ringkasan mengenai total pendapatan dan belanja daerah Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2019. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya

mengalami perubahan, biasanya disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. Anggaran yang diterima oleh pemerintah daerah dapat berubah menjadi lebih besar ataupun lebih kecil. Begitu juga dengan realisasinya yang mengalami perubahan setiap tahun di setiap provinsinya. Terlihat bahwa pada beberapa provinsi realisasi belanja modal tidak di realisasikan dengan baik.

Hasil penelitian terdahulu memberikan hasil yang berbeda menurut Mulyani & Wibowo (2017) tentang penelitian “Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan” menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Darwanis & Saputra (2014) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian Nugroho (2012) juga menemukan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Begitu juga dengan penelitian Antari & Sedana (2018) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Antari & Sedana (2018) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian sebelumnya menggunakan

sampel LKPD Provinsi Bali sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel LKPD Seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2017-2019.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui apakah Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan Kinerja Keuangan pemerintahan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di masa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang pendapatan dan belanja daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat

terutama berkaitan langsung dengan bidang akuntansi sektor publik. Dan juga sebagai pembelajaran terutama bagi mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran

Dalam bahasa Inggris istilah anggaran dikenal dengan kata *budget*, berasal dari bahasa Perancis *bougette* yang berarti tas kecil. Menurut Indra (2010) berdasarkan *Governmental Accounting Standards Board* (GASB), anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Sedangkan menurut Kusufi & Halim (2016) anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Berdasarkan beberapa definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa anggaran adalah rencana operasi keuangan yang diwujudkan dalam bentuk finansial dan disusun secara sistematis untuk periode waktu tertentu, berisi estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

2.1.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas pada periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Halim, 2007). Menurut Darise (2008) pendapatan daerah digolongkan menjadi 3, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dengan sumber-sumber pemungutan yang terdiri dari :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu terdiri dari sebagai berikut:

- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari :

1) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam. Dana bagi hasil bersumber dari pajak yaitu: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak

Penghasilan (PPh) pasal 25, pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.

Dana bagi hasil sumber daya alam yaitu: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) berfungsi sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. DAU suatu daerah dapat ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup: hibah/ bantuan dari pemerintah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari teknis kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian, dan bantuan keuangan dari teknis atau dari pemerintah daerah lainnya.

2.1.3 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah (Darise, 2008). Maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Dalam belanja daerah terdapat bagian-bagian di dalamnya antara lain belanja operasi dan belanja modal.

Belanja operasi menurut Mardiasmo (2009) adalah belanja untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan aktivitas pemerintah sehari-sehari, pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Termasuk dalam pengeluaran operasional adalah belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga, cicilan utang, dan lain-lain. Pengeluaran operasional pemerintah memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan.

Belanja modal menurut The Ministry of Finance of The Republic of Indonesia (2017) adalah jenis pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal dapat berupa belanja daerah seperti pembelian tanah, gedung ataupun gudang, peralatan serta aset tak berwujud.

2.1.4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Menurut Darise (2008) anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan apabila terjadi defisit atau surplus.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Semua penerimaan yang menjadi hak dan semua pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD. Sebagaimana yang telah disebutkan Pasal 3 ayat 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, fungsi APBD dibagi menjadi 6 yaitu :

1. Fungsi Otorisasi

Anggaran daerah adalah dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan

Anggaran daerah adalah pedoman bagi manajemen untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk meneliti apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau tidak.

4. Fungsi Alokasi

Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi Distribusi

Anggaran daerah harus mengandung arti atau memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

6. Fungsi Stabilisasi

Anggaran daerah harus mengandung arti atau menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

2.1.5 Kinerja Keuangan

2.1.5.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Jumingan (2006) kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas perusahaan. Sedangkan menurut Darise (2008) kinerja keuangan adalah realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual.

Berdasarkan beberapa definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan pada periode tertentu dengan berbagai indikator yang disusun berdasarkan basis akrual. Menurut Halim (2007) kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah salah satu ukuran yang dihasilkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sehubungan dengan anggaran daerah dan mampu digunakan untuk melihat kemampuan daerah tersebut.

2.1.5.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Jumingan (2006) pengukuran kinerja keuangan memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal, dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun sebelumnya.
2. Mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

Berdasarkan tujuan pengukuran kinerja keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan sangatlah penting dalam menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan penggunaan aset yang dimiliki. Pengukuran kinerja keuangan juga mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu instansi, serta mengevaluasi kinerja keuangan.

2.1.5.3 Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Sadjiarto (2000) terdapat 5 manfaat pengukuran kinerja keuangan yaitu :

1. Pengukuran kinerja keuangan meningkatkan mutu pengambilan keputusan.
2. Pengukuran kinerja keuangan meningkatkan akuntabilitas internal.
3. Pengukuran kinerja keuangan meningkatkan akuntabilitas publik.
4. Pengukuran kinerja keuangan mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan.
5. Pengukuran kinerja keuangan memungkinkan suatu entitas untuk dapat menentukan sumber daya secara efektif dan efisien agar meminimalisir anggaran yang tidak terealisasi.

Berdasarkan manfaat pengukuran kinerja keuangan diatas, dapat dilihat bahwa pengukuran kinerja keuangan sangat berguna untuk meningkatkan mutu pengambilan keputusan pemerintah, meningkatkan perencanaan strategi dan penetapan tujuan, serta memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Ni Putu Sukma Gina Antari dan Ida Bagus Panji Sedana (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
2.	Budianto dan Stanly W. Alexander (2016)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Dana perimbangan

				berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3.	Darwanis, Saputra, dan Ryanda (2014)	Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh)	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen : Belanja Modal Variabel Intervening : Pendapatan Asli Daerah	Belanja modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan namun belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah

4.	Astiti D. N. Yulia dan N. P. Sri Hartati Mimba (2016)	Pengaruh Belanja Operasi dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen : Belanja Operasi dan Belanja Modal	Belanja operasi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
5.	Mulia Andirfa, Hasan Basri, dan M. Shabri A. Majid (2016)	Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen : Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah	Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan

				pemerintah daerah
6.	Ni Luh Putu Lindri Puspitasari dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati (2015)	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen : Belanja Modal Variabel Intervening : Pendapatan Asli Daerah	Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Belanja modal berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah akan tetapi berpengaruh tidak langsung yaitu belanja modal terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening.
7.	Sri Mulyani dan Hardiyanto Wibowo (2017)	Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> , dan Pendapatan Asli Daerah terhadap	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen : Belanja Modal,	Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

		Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2015)	Ukuran Pemerintah Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> , dan Pendapatan Asli Daerah	Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Intergovernmental revenue berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
8.	Fajar Nugroho (2012)	Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Daerah Variabel Independen : Belanja Modal Variabel Intervening :	Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

			Pendapatan Asli Daerah	
9.	Noor Farieda Awwaliyah, Ratno Agriyanto, dan Dessy Noor Farida (2019)	<i>The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance</i>	<i>Dependent Variable : Regional Government Financial Performance</i> <i>Independent Variable : Regional Original Income and Balance Funding</i>	<i>Regional original income has a positive effect on regional government financial performance</i> <i>Balance funding has a positive effect on regional government financial performance</i>
10.	Rahmat Yuliansyah, Eva Indah Susanti, dan Asri Yanti (2020)	<i>The Effect of Regional Original Revenue, Balance Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of District Governments in West Java Province in 2013-2017</i>	<i>Dependent Variable : Financial Performance of District Governments</i> <i>Independent Variable : Regional Original Revenue, Balance Funds, and Capital Expenditures</i>	<i>Regional original revenue has a positive effect on financial performance of district governments</i> <i>Balance funds has a negative effect on financial performance of district governments</i>

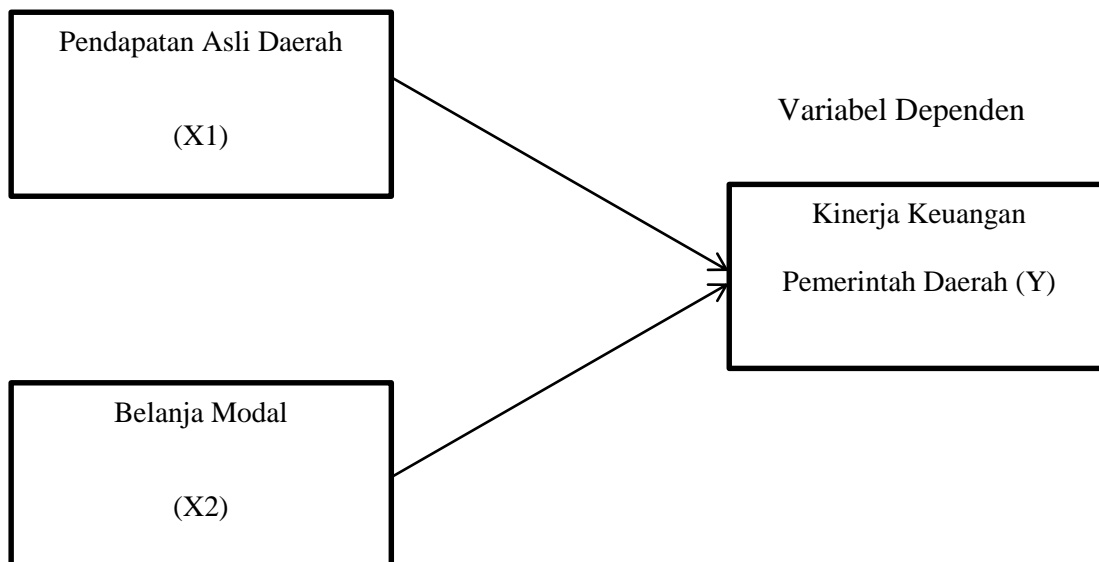
				<i>Capital expenditures has a positive effect on financial performance of district governments</i>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Kerangka Teori

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka model konseptual penelitian dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Teori

Variabel Independen



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas pada periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Halim, 2007). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dengan sumber-sumber pemungutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Darise, 2008).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Antari & Sedana (2018) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik. Penelitian yang dilakukan Budianto & Alexander (2016) mengemukakan bahwa dengan menekankan hasil PAD yang berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang dapat meningkatkan PAD sehingga mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanis & Saputra (2014) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki peranan penting, karena melalui

pendapatan asli daerah tersebut dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga pemerintah daerah akan terus-menerus meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangannya. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Awwaliyah *et al.* (2019) mengemukakan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin mandiri suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut sehingga dapat meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah *et al.* (2020) juga mengemukakan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh maka semakin tinggi pula tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Antari & Sedana (2018) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Budianto & Alexander (2016) juga menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanis & Saputra (2014) juga menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Awwaliyah *et al.* (2019) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sejalan juga dengan hasil penelitian Yuliansyah *et al.* (2020) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian mengenai pendapatan daerah, maka hipotesis yang diajukan oleh penulis yaitu:

- H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**
- H_{1a} : Pajak Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**
- H_{1b} : Retribusi Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**
- H_{1c} : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

2.4.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal adalah jenis pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah. Belanja modal dapat berupa belanja daerah seperti pembelian tanah, gedung ataupun gudang, peralatan serta aset tak berwujud (The Ministry of Finance of The Republic of Indonesia, 2017).

Dalam penelitian Astiti & Mimba (2016) mengemukakan bahwa pengalokasian dana pada belanja modal yang lebih banyak nantinya akan membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan sehingga menghasilkan pendapatan daerah, sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Puspitasari & Sulindawati (2015) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur berupa fasilitas pelayanan umum yang tinggi dapat dikatakan mampu meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Andirfa *et al.* (2016) mengemukakan bahwa infrastruktur yang terdapat di suatu daerah diharapkan nantinya akan mampu menciptakan efisiensi pada berbagai sektor, produktivitas masyarakat meningkat sehingga hal tersebut akan berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.

Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah *et al.* (2020) menyatakan bahwa semakin tinggi alokasi belanja modal suatu daerah maka akan semakin tinggi pula tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astiti & Mimba (2016) dan Puspitasari & Sulindawati (2015) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, begitu juga dengan Andirfa *et al.* (2016) yang menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah *et al.* (2020) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian mengenai belanja modal diatas, maka hipotesis yang diajukan oleh penulis, yaitu:

H₂ : Belanja Modal berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

III. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini masuk kategori penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Seluruh Provinsi di Indonesia. Sumber data lainnya diperoleh dengan mengkaji dan memahami buku, jurnal penelitian serta skripsi terdahulu yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, belanja daerah, dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

3.2 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Seluruh Provinsi di Indonesia. Dengan sampel yang digunakan yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2017-2019.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh menggunakan metode dokumentasi. Dimana data tersebut merupakan laporan anggaran pendapatan asli daerah dan belanja daerah.

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah (X1)

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas pada periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan asli daerah dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dengan sumber-sumber pemungutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Darise, 2008). Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur pendapatan asli daerah yaitu dengan rasio efektivitas pendapatan asli daerah. Menurut Mahmudi (2010) rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang di targetkan. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

2. Belanja Modal (X2)

Belanja modal adalah jenis pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal dapat berupa belanja daerah seperti pembelian tanah, gedung ataupun gudang, peralatan serta aset tak berwujud (The Ministry of Finance of The Republic of Indonesia, 2017).

Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur belanja modal yaitu dengan rasio keserasian belanja modal. Rasio keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi, berarti presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2007). Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah salah satu ukuran yang dihasilkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sehubungan dengan anggaran daerah dan mampu digunakan untuk melihat kemampuan daerah tersebut (Halim, 2007). Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah rasio pertumbuhan. Menurut Halim (2008) rasio pertumbuhan dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan pendapatannya dari satu periode ke periode berikutnya.

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan :

P_n = Total pendapatan daerah / pendapatan asli daerah / belanja modal / belanja operasi yang di hitung pada tahun ke-n.

P_0 = Total pendapatan daerah / pendapatan asli daerah / belanja modal / belanja operasi yang di hitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n).

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif mendeskripsikan sebuah data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas sehingga mudah dipahami (Ghozali, 2016).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah alat yang digunakan sebagai alat pendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan mengenai asumsi klasik berdasarkan persamaan regresi linier berganda yang digunakan. Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa uji yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan sebagai penguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Menurut Priyastama (2017) model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki nilai residual terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas adalah uji yang digunakan untuk menemukan adanya korelasi yang sempurna atau yang mendekati sempurna antar variabel independen pada model regresi. Uji multikolonieritas juga digunakan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan tentang pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Sujarweni & Retnani (2019) jika VIF yang dihasilkan antara 1-10, maka tidak terjadi multikolonieritas. Menurut Priyastama (2017) model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji dimana terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$). Uji autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan nilai Durbin Watson. Jika nilai Durbin Watson diantara -2 sampai 2 maka tidak terjadi autokorelasi (Sujarweni & Retnani, 2019). Menurut Priyastama (2017) model regresi yang baik adalah tidak memiliki autokorelasi.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah uji dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Menurut Priyastama (2017) model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heterokedastisitas.

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih terhadap variabel independen (Priyatno, 2014). Analisis regresi berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Belanja Modal (X2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Menurut Bawono (2017) persamaan regresi linier berganda dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja keuangan pemerintah daerah

a = Konstanta

b₁, b₂ = Koefisien regresi

X₁ = Pendapatan asli daerah

X₂ = Belanja modal

3.5.4 Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk menghitung seberapa besar variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan derajat kebebasan pembilang menggunakan $K-1$ atau jumlah variabel dikurangi 1 (Setiawan, 2015). Penentu hipotesis diterima atau ditolak adalah sebagai berikut

- a. Jika koefisien F hitung signifikan pada taraf $> 5\%$ maka H_0 diterima.
- b. Jika koefisien F hitung signifikan pada taraf $<$ atau sama dengan 5% maka H_0 ditolak.

3.5.5 Uji Statistik T

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah model persamaan regresi telah signifikan untuk digunakan mengukur pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Menurut Bawono (2017) penentu hipotesis diterima atau ditolak adalah sebagai berikut :

- a. Jika $T \text{ hitung} < T \text{ tabel}$ atau $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$ maka H_0 diterima, sehingga tidak berpengaruh signifikan secara parsial.
- b. Jika $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$ atau $T \text{ hitung} < T \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak, sehingga berpengaruh signifikan secara parsial.

3.5.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh hubungan antara variabel independen mempengaruhi variabel dependen (Bawono, 2017). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat nilai R^2 pada hasil analisis regresi linier berganda yang diperoleh.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan apabila tingginya pendapatan asli daerah, maka dapat diartikan bahwa daerah tersebut mampu membiayai sendiri seluruh kegiatan di dalam daerah tersebut. Sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja keuangan pemerintah yang baik.
2. Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan apabila adanya pengaruh positif belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menandakan bahwa belanja modal dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja keuangan pemerintah yang baik.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun beberapa keterbatasan pada penelitian ini, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki dan mengembangkannya kembali.

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Melihat sampel yang digunakan pada penelitian ini dari tahun 2017-2019, maka masih dalam keadaan normal yaitu sebelum terjadinya pandemi *Covid-19*.
2. Penelitian ini menguji pendapatan asli daerah dan belanja modal seluruh provinsi di Indonesia secara umum, tidak berdasarkan tinggi atau rendahnya pendapatan asli daerah dan belanja modal pada provinsi tertentu.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun saran yang dapat berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Melihat variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen, maka diharapkan dalam penelitian selanjutnya untuk menambah variabel lainnya.
2. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menggunakan pengukuran lain seperti Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Indeks Kemampuan Rutin.

3. Dalam penelitian ini hanya menguji pendapatan asli daerah dan belanja modal seluruh provinsi di Indonesia secara umum, maka diharapkan dalam penelitian selanjutnya untuk menguji berdasarkan tinggi atau rendahnya pendapatan asli daerah dan belanja modal pada provinsi tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. S. A. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 30–38.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080.
- Astiti, D. N. Y., & Mimba, N. P. H. (2016). Pengaruh Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3), 1924–1950.
- Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., & Farida, D. N. (2019). *The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance*. 1(1), 25–46.
- Bawono, A. (2017). *Multivariate Analisis dengan SPSS*. STAIN Salatiga Pres.
- Budianto, & Alexander, S. W. (2016). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *EMBA*.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Indeks.
- Darwanis, D., & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 183–199. <https://doi.org/10.24815/jdab.v1i2.3628>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Indra, B. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. Bumi Aksara.
- Kusufi, H. dan. (2016). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dua)*. BPFE.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1), 57–66.
- Nugroho, F. (2012). *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening*.
- Priyastama, R. (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS*. Start Up.
- Priyatno, D. (2014). *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*. CV Andi Offset.
- Purnamasari, D. M. (2019). *Serapan APBD 2019 Baru 60 Persen*. Nasional Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/01/16245661/serapan-apbd-2019-baru-60-persen-mendagri-minta-seluruh-kepala-daerah>

- Puspitasari, N. L. P. L., & Sulindawati, N. L. G. E. (2015). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Kabupaten Buleleng). *E-Jurnal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 1–10.
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah. *Akuntansi Dan Keuangan*.
- Setiawan, B. (2015). *Teknik Praktis Analisis Data Penelitian Sosial dan Bisnis Dengan SPSS*. Andi.
- Sujarweni, V. W., & Utami Retnani, L. (2019). *Pintar Mengolah Data Statistik Untuk Segala Keperluan Secara Otodidak*. Start Up.
- Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Pustaka Baru Press.
- The Ministry of Finance of The Republic of Indonesia. (2017). *Summary of the Local Government Budgets*. 1–20.
- Yuliansyah, R., Susanti, E. I., & Yanti, A. (2020). *The Effect of Regional Original Revenue , Balance Funds , and Capital Expenditures on the Financial Performance of District Governments in West Java Province in 2013-2017 district budget*. 127(Aicar 2019), 152–156.